



**PERAN PKN SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBANGUN SIKAP
DEMOKRATIS DAN PARTISIPASI SISWA DALAM ORGANISASI DI SMA**

Wilda Hamisa ^{1*}, Mukhamad Murdiono ¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: wildahamisa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap peran PKN sebagai pendidikan politik untuk: (1) membangun sikap demokratis siswa (2) membangun partisipasi siswa dalam organisasi (3) mengetahui hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dan (4) upaya untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh (Miles and Huberman) dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Membangun sikap demokratis siswa melalui sikap interaktif guru di kelas, pemberian materi PKN pada pertemuan dikelas menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok (2) Membangun partisipasi siswa dilakukan melalui pembelajaran dikelas. Sikap interaktif guru PKN dalam proses pembelajaran mendorong siswa ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya, dukungan sekolah melalui kegiatan forum diskusi sangat membantu siswa dalam berfikir dan bersikap aktif (3) Hambatan terjadi karena adanya faktor lingkungan sekitar yang kurang baik membawa dampak negatif bagi siswa, adanya rasa malas. (4) Upaya dengan mengupayakan pembelajaran yang menarik untuk siswa, memberikan motivasi agar mampu mengambil setiap keputusan, serta mengontrol tingkah laku siswa melalui kerjasama antara guru dan orang tua.

Kata kunci: *pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, sikap demokratis, partisipasi, organisasi kesiswaan*

***THE ROLE OF CIVIC EDUCATION AS A POLITICAL EDUCATION TO BUILD
STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITUDE AND PARTICIPATION IN STUDENT
ORGANIZATION AT SMA***

Abstract

This research aims to reveal the role of civic education as political education to: (1) build students' democratic attitude, (2) build students' participation in organization (3) find out the obstacles in building students' democratic attitude and students' participation, and (4) attempt to overcome the obstacles in building students' democratic attitude and students' participation. The data of the research were collected by interviewing, observing and documenting. An interactive analysis model by (Miles and Huberman) was used to analyze the data, with steps of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the research are as follows. (1) the building students' democratic attitude through interactive teacher in class, the civic education materials were given in class by using learning methods like group discussion (2) the building students' participation was done by learning in class. Interactive civic education teacher in learning process encourage the students to join the participation to give their opinions, the school support through forum discussion activity is very helpful for students in thinking and active (3) the obstacles happen because of the bad environment factor that brings negative impact to the students, the laziness. (4) the effort by giving an interesting learning for the students, giving motivations in taking decisions, also controlling the behavior of the students through cooperation between teachers and parents

Keywords: *civic education, political education, democratic attitude, participation, student organization*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menjadikan manusia Indonesia yang bermoral, beretika dan menjadi warganegara yang baik. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003) dijelaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Saat ini bangsa Indonesia merasakan pendidikan belum mampu menghasilkan manusia yang berkualitas, hal ini disebabkan pola pikir bertolak dari hati nuraninya dan menampilkan banyak orang pandai tetapi bermasalah dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, pengembangan jati diri atau penanaman sikap individu harus dibentuk, dikembangkan dan dimantapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga muncul hasrat untuk berubah dalam diri siswa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini sebagai pendidik selama ini telah ditanamkan dan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Namun yang paling penting dalam hal ini adalah pembiasaan yang harus dilakukan sebagai pendidik dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2003, p. 49). Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan lewat pendidikan formal yaitu persekolahan dan pendidikan di masyarakat melalui organisasi yang ada. PKn ini menjadi mata pelajaran yang wajib di SD, SMP, dan SMA sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas.

Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan bahwa hakikatnya membekali kemampuan-kemampuan kepada peserta didik dalam hal tanggung jawabnya sebagai warga negara, yaitu warga negara yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa lain. Tujuan ini sebagai bekal ke siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berfikir kritis, dan kreatif agar peserta didik menjadi warga negara yang kritis maka perlu sekali diajarkan pendidikan politik ke siswa. Pendidikan politik ini termuat dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kartini & Kartono (1996, p. 16) mengemukakan bahwa PKn di sekolah berperan sebagai pendidikan politik bagi siswa, salah satu tujuan pendidikan politik adalah membuat rakyat menjadi sadar politik. Sadar politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup (Surbakti, 2010 p 114). Oleh karena itu, kesadaran politik siswa dapat dibentuk salah satunya melalui pembelajaran PKn. Pendapat tersebut telah dipertegas melalui misi PKn yang dikemukakan oleh Maftuh & Sapriya (2005, p. 321) bahwa: PKn sebagai pendidikan politik yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekatan politik (political literacy) dan kesadaran politik (political awareness), serta kemampuan berpartisipasi politik (political participation) yang tinggi.

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada usianya dikatakan masih labil. Tetapi pada usia itu masa-masa paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu, dalam usia itu ia mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikannya secara langsung ke masyarakat. Dalam usia tersebut, seorang individu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan berbagai aspek yang ia miliki, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Pada usia ini mudah untuk menanamkan konsep tentang berbagai hal baru, termasuk pendidikan politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta politik dan menjadi sasaran pem bodohan politik.

Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politiknya. Oleh karena itu, kesadaran politik bagi setiap para pemilih pemula sangat di perlukan agar mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Demokrasi dalam suatu negara akan dapat tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negaranya sendiri yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang lebih cerah.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan September 2015 bahwa masih kurangnya kesadaran para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kesiswaan yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta khususnya pada pemilihan IPM. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah partisipasi dalam pemilihan ketua IPM dari 311 siswa hanya 115 yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan, sedangkan 185 siswa tidak berpartisipasi dalam pemilihan IPM. Ini menunjukkan bahwa sikap demokratis mereka perlu dibangun agar lebih aktif dalam kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini adalah dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik siswa diharapkan siswa mempunyai sikap demokratis dan aktif dalam partisipasi siswa terhadap organisasi di sekolah. Itu berarti Pendidikan Kewarganegaraan dapat melatih siswa untuk berfikir kritis, rasional dan kreatif dalam kegiatan organisasi di sekolah. peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mengungkap peran PKn sebagai pendidikan politik untuk: (1) membangun sikap demokratis siswa (2) membangun partisipasi siswa dalam organisasi (3) mengetahui hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dan (4)

upaya untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2006, p. 6).

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwodiningratan Penelitian diawali dengan kegiatan survei pada bulan Agustus 2015, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal, seminar dan revisi proposal selama 4 (empat) bulan. Tahap selanjutnya adalah kegiatan penelitian yang dirancang selama 6 (enam) bulan.

Sumber data yang dimaksud disini adalah subjek dari mana data diperoleh dan dipilih berdasarkan kriteria menggunakan *purpose sampling* dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan sehingga, tidak dapat dilakukan secara acak. Selain itu pemilihan secara *puspose sampling* mempertimbangkan subjek yang mengetahui pemasalahan penelitian dengan kriteria: (1) mereka yang memberi kebijakan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, (2) mereka yang berperan dalam pembelajaran PKn di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, (3) mereka yang berperan dalam kegiatan organisasi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mengambil subjek berikut ini: Waka Kurikulum yang mewakili Kepala sekolah yang memberi kebijakan dan bertanggung jawab penuh di sekolah, guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengetahui kondisi kelas dan mengajarkan PKn kepada siswa di kelas, siswa yang ikut dalam kegiatan organisasi di sekolah. Satu diantara sumber data tersebut adalah sebagai informan kunci yaitu guru PKn di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan dalam sekolah dan juga siswa-siswi SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta berjumlah tiga belas (13) orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi di lapangan dilakukan untuk mengamati, melihat, mengkaji dan menilai strategi-strategi atau cara-cara yang membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa, wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada siswa, guru PKn, dan Kepala sekolah, hal tersebut dilakukan agar informasi diperoleh dalam kondisi yang sebenarnya. Dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data tentang membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Ghony & Almanshur, 2012, p. 322). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber adalah pengecekan data dengan membandingkan dan mengecek ulang data yang diperoleh dari informan dengan informasi lain. Sedangkan triangulasi teknik pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti membandingkan hasil wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992, pp. 10-12) adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik dalam Membangun Sikap Demokratis Siswa

Untuk mengungkap pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis siswa, maka dapat disajikan sebagai berikut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kerr (1999, p. 6) menyatakan tentang Pendidikan Kewarganegaraan bahwa:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas mencakup proses generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam hal ini yaitu menjadi warga negara yang baik atau demokratis. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam mengajarkan warga negara untuk bersikap aktif.

Sekolah atau lembaga pendidikan merupakan usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan siswa, maka sekolah merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Bab II Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003) yang menyatakan bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, merupakan upaya khusus dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Oleh karena itu, peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya pelajar sebagai generasi penerus yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guru berusaha membangun sikap siswa dengan me-

nyisipkan hal-hal yang dapat membangun sikap siswa, siswa diberi motivasi, dan dipahamkan akan pentingnya membangun sikap demokratis. Pendidikan politik yang siswa dapatkan di sekolah tentunya melalui kegiatan sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua organisasi dan kegiatan lain yang mengajarkan siswa untuk aktif, kritis, berpikir maju, memahami akan pentingnya tanggung jawab dan mengerti akan hak dan kewajibannya.

Pemberian materi PKn yang diberikan guru PKn di kelas saat pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dengan mempraktekkan langsung cara mengeluarkan pendapat saat pembelajaran di kelas secara otomatis akan dapat memacu siswa untuk dapat berargumentasi dalam mengemukakan pendapat dan berinteraksi di kelas. Selain itu guru bersikap interaktif dalam pembelajaran di kelas, hal ini dilakukan guru agar dapat menstimulus siswa dan mengarahkan siswanya.

Selain itu, untuk membangun sikap demokratis siswa tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah itu sendiri. Kebijakan yang diambil pihak sekolah dalam membangun sikap demokratis juga berpedoman pada Dinas Pendidikan, Keputusan Walikota, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja dan dari Muhammadiyah sendiri yaitu pimpinan wilayah dan pimpinan daerah.

Kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah dalam membangun sikap demokratis siswa juga diberikan kepada guru. Kebijakan tersebut berupa pemberian kebijakan kepada setiap guru dalam meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran maupun dalam membimbing siswa di luar pembelajaran. Keterlibatan guru PKn dalam organisasi keiswaan menjadi faktor dalam membangun sikap demokratis siswa, dalam membangun sikap demokratis tidaklah mudah jika dilakukan hanya oleh beberapa guru saja, tetapi semua guru harus dilibatkan dalam hal ini. Selain itu dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, guru dan pihak sekolah harus bekerja ekstra dalam membangun sikap demokratis baik melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Sekolah melibatkan semua guru dalam membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Baik itu melalui mata pelajaran maupun melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang diadakan di sekolah, selain itu adanya kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di luar sekolah juga sangat membantu guru sendiri dalam membangun sikap demokratis. Adanya perbedaan sikap siswa di sekolah tidak lepas dari karakter masing-masing siswa yang berbeda-beda, mulai dari keaktifan siswa di sekolah maupun hasil belajar siswa itu sendiri. Siswa yang aktif tidak menjamin bahwa dia mampu mendapatkan hasil belajar yang baik, begitu juga sebaliknya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa yang aktif juga dapat mendapatkan hasil belajar yang baik. Hal ini bisa terjadi karena kesibukan yang dialami oleh masing-masing siswa, sehingga siswa tidak dapat membagi waktu untuk belajar dengan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan

Untuk mengungkap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dalam membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, maka dapat disajikan sebagai berikut.

Pendidikan Kewarganegaraan membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan di sekolah harus dibangun sejak sekarang. Salah satu cara dalam membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejalan dengan pendapat Moldovan dan Nicoleta, (2014, pp. 365-367) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen penting pendidikan, mendesak warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik demokrasi, untuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka bersama-sama dengan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan.

Pendidikan Kewarganegaraan mendorong siswa untuk membangun partisipasi dalam organisasi di sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik mengajarkan siswa akan pentingnya berpartisipasi dimasa sekarang. Membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan tidak lepas dari kebijakan pihak sekolah dan peran guru dalam membangun partisipasi siswa itu sendiri, partisipasi siswa dalam organisasi tidak lepas dari peran kesiswaan di sekolah sebagai wadah pembinaan siswa, dengan demikian kesiswaan merupakan alah satu wadah yang sangat penting bagi anak, karena di dalamnya diajarkan berbagai keterampilan dan kedisiplinan. Kesiswaan akan berfugsi efektif dalam menanamkan

nilai demokrasi apabila didukung oleh aktivitas yang tinggi dari para siswa dan dukungan semua pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, dan sebagainya).

Tugas kesiswaan atau IPM adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasi semua aparat kepengurusan, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan di rencanakan oleh aparat kepengurusan, pemimpin aparat. IPM merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan didirikannya IPM adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa.

Kesiswaan merupakan suatu organisasi yang dapat membantu siswa dalam bergaul di lingkungan sekolah, maupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Partisipasi dalam berorganisasi siswa akan terlihat dalam siswa yang aktif mengikuti organisasi. Partisipasi siswa memang sangat diperlukan sekali untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat berorganisasi yaitu memupuk sikap disiplin, munculnya rasa percaya diri yang tinggi, bersikap kritis terhadap setiap perubahan yang ada, aktif mengemukakan ide-ide dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap semua hal.

Espinola, (2005, p. 12) mengungkapkan bahwa, "*Participation opportunities may give young people the necessary skills, knowledge and motivation to become active citizens*". Partisipasi dapat memberi kesempatan kepada siswa tentang pentingnya keterampilan, pengetahuan dan motivasi untuk menjadi warga negara yang aktif. Siswa adalah individu yang mempunyai potensi-potensi yang perlu digali dan dikembangkan serta direalisasikan dalam wujud nyata, siswa dituntut mempunyai jiwa kepemimpinan.

Cara bergaul dengan kelompoknya atau lingkungan sekitarnya untuk memperoleh suatu pengakuan akan eksistensi dirinya sebagai remaja yang tumbuh berkembang di dalam suatu pergaulan masyarakat. Pada dasarnya siswa SMA merupakan remaja yang sedang berkembang sehingga mempunyai sikap yang ingin menang sendiri, emosional.

Kurt Lewin yang dikutip oleh Wirawan (2000, p. 43) menyatakan bahwa "Sikap dan karakteristik remaja yang sering timbul adalah pemalu dan perasa, munculnya konflik dan emosi yang kuat, muncul tingkah laku radikal". Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMA masih

labil dan masih seenaknya sendiri. Siswa di lingkungan keluarga pun sering kali remaja bersikap acuh kepada orang tua, tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku di dalam keluarga, sering membangkang terhadap orang tua. Remaja dalam hal ini ingin merasa bebas sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada orang lain yang mengganggu. Dengan siswa ikut berpartisipasi dalam organisasi kesiswaan diharapkan siswa lebih terbuka wawasannya dan mempunyai sikap yang lebih baik lagi.

Sekolah sangat mendorong siswanya untuk membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan. Tidak hanya melalui kegiatan sekolah, namun juga melalui pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Selain itu kerja sama antara pihak sekolah dengan orang tua sangat mendukung demi membangun partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan. Telah dijelaskan oleh pihak sekolah bahwa hubungan yang baik antara siswa dengan guru maupun guru dengan orang tua siswa dapat mengontrol perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua siswa diharapkan agar dapat memantau perkembangan siswa itu sendiri.

Hambatan dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa dalam Organisasi

Untuk mengungkap hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, maka dapat disajikan sebagai berikut.

Sikap demokratis dan partisipasi siswa yang berusaha dibangun dalam organisasi kesiswaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ternyata mengalami hambatan yang dirasa sangat penting. Hambatan ini ditemui dalam beberapa faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar ikut ambil andil dalam hambatan untuk membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, sebab lingkungan sekitar juga menentukan sikap dan perilaku siswa itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan siswa lebih banyak berada di luar sekolah.

Sejalan dengan pernyataan Walgito, (2002, pp. 55-56) tentang pembentukan sikap seseorang, yaitu karena adanya: Faktor individu itu sendiri atau faktor dari dalam, yang

dimaksud faktor dari dalam adalah bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja akan diterimanya tetapi individu mengadakan seleksi mana yang akan diterima dan mana yang ditolak. Faktor luar atau ekstern yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan rangsangan atau stimulus atau yang mengubah sikap.

Berdasarkan pernyataan tersebut ada beberapa faktor tentang membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan. Baik faktor yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Selain itu hambatan yang paling banyak justru karena dalam diri sendiri, adanya rasa malas untuk berinteraksi dengan yang orang lain.

Pengaruh dari teman-teman sendiri juga yang menjadikan siswa malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Hal ini dapat merugikan siswa itu sendiri. Pada dasarnya siswa SMA masih labil sehingga pengaruh-pengaruh negatif yang muncul akan mempengaruhi siswa itu sendiri. Siswa harus diajarkan tentang kemampuan memilih hal yang baik dan menghilangkan hal yang buruk. Sikap demokratis dan partisipasi siswa yang dibangun dalam organisasi kesiswaan yang dilakukan oleh guru hanya sebatas melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga guru tidak bisa menerapkan secara maksimal. Hambatan yang alami oleh guru dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan juga dirasakan oleh sebagian besar siswa. Adanya miss communication antara guru dan orang tua siswa juga menjadi hambatannya, seharusnya ada komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa untuk mengetahui perkembangan siswa sendiri.

Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa dalam Organisasi

Untuk mengungkap upaya untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, maka dapat disajikan sebagai berikut.

Upaya untuk mengatasi hambatan membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan dapat diatasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu

dengan meningkatkan kinerja guru, baik melalui mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran dan memotivasi siswa itu sendiri. Sikap demokratis dan partisipasi siswa dapat dibangun agar dapat mengembangkan kreativitas peserta didik untuk melakukan kajian-kajian berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diintegrasikan kepada masing-masing individu sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak yang berpijak pada pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah-sekolah.

Leung & Yuen, (2009, pp. 31-32) berpendapat bahwa Jika dilihat dari diperluas konsepsi politik dan kewarganegaraan, sekolah adalah komunitas politik dimana siswa diberdayakan untuk berpartisipasi aktif 'di sini dan sekarang' warga, mempengaruhi urusan komunal. Penelitian ini membahas bagaimana siswa keterlibatan dalam urusan sekolah terkait dengan mempromosikan partisipatif kewarganegaraan dan meneliti bagaimana upaya tersebut mungkin memiliki dampak pada siswa. Hal ini masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ada banyak bukti yang mendukung Kehadiran partisipasi kewarganegaraan di sekolah.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut bahwa ada keterkaitan antara sekolah dan politik, siswa diberdayakan untuk ikut berpartisipasi aktif di sekolah. Dan siswa diupayakan untuk ikut serta dalam kegiatan yang dapat menunjang keaktifan mereka di sekolah. Keterkaitan antara sekolah dan kegiatan politik yang dilakukan siswa terlihat dari tingkat partisipasi mereka dalam berorganisasi di sekolah, berkumpul dalam kelompok diskusi dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemampuan mereka berorganisasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik yang mereka kuasai).

Zamroni, (2007, p. 160) menjelaskan bahwa tidak mengherankan jika seluruh sistem pendidikan di dunia senantiasa memiliki tugas untuk menanamkan pada generasi muda nilai-nilai politik serta kebijakan politik penguasa. Setiap rezim yang sedang berkuasa secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan terhadap PKn. PKn ibarat pedang bermata dua, disatu sisi dapat dijadikan sarana untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah.

Pendidikan politik tentunya sangat membantu siswa dalam membangun sikap mereka baik dalam sikap demokratis maupun

dalam partisipasi mereka di sekolah. Hal ini harus diupayakan oleh sekolah agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh guru PKn dalam rangka upaya mengatasi hambatan membangun sikap demokratis siswa dan partisipasi siswa dikembangkan melalui kegiatan yang mencerminkan sikap yang baik, aktif, kreatif dalam berpikir serta memiliki keinginan lebih maju dalam hal ini melalui diskusi dan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah seperti organisasi IPM dan ekstrakurikuler.

Guru selalu berusaha memberikan stimulus (rangsangan) dan contoh-contoh terkait dengan sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan, seperti partisipasi siswa dalam kepengurusan IPM maupun ekstrakurikuler yang ada, serta memaknai kegiatan yang positif tersebut agar dapat diaplikasikan secara baik pada dirinya, memberi pengarahannya tentang pentingnya ikut organisasi dan berpikir kritis disaat bangsa kita diremehkan bangsa lain. Kegiatan seperti ini bisa diarahkan pada lima aspek perkembangan sikap perilaku maupun kemampuan dasar. Pada aspek sikap perilaku, melalui mengarahkan siswa untuk dapat mengembangan potensi yang dimilikinya sehingga siswa dapat mengeluarkan potensi yang sudah lama terpendam.

Berbagai cara telah dilakukan guru PKn dan pihak sekolah untuk membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi kesiswaan melalui kegiatan IPM yang sudah diprogramkan oleh sekolah juga melalui ekstrakurikuler yang ada, dan membangun sikap masing-masing siswa. Diantaranya pembiasaan yang ada di sekolah, doa bersama sebelum memulai pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar siswa selalu bertaqwa kepada Tuhan YME. Kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai agama ini sudah menunjukkan sumbangsih tersendiri. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan salat wajib yang dilakukan siswa tanpa disuruh. Kegiatan sholat dan doabersama merupakan salah satu implementasi pendidikan karakter yang menjurus pada nilai agama. Pembiasaan dan partisipasi siswa inilah akan menjadi kebiasaan siswa sehingga nilai positif dapat di kehidupan sehari-harinya.

Upaya lain yang dilakukan sekolah melakukan pemetaan yang dilakukan oleh masing-masing Wali Kelas, kemudian dari situ secara personal Wali Kelas mencoba memahami siswa tersebut dengan memahami tingkah

laku siswa dan mencoba memahami siswa bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang sikap siswa itu penting bagi dirinya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

Membangun sikap demokratis dilakukan melalui Pembelajaran PKn oleh guru dengan bersikap interaktif dalam pembelajaran dikelas, ini dilakukan agar menstimulus siswa dalam mengarah siswanya. Pemberian materi PKn pada setiap pertemuan dikelas menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dengan cara mengeluarkan pendapat saat pembelajaran di kelas, secara otomatis akan mendorong siswa agar mampu berargumentasi. Kebijakan yang diberikan pihak sekolah berupa meningkatkan kinerja guru PKn dalam pembelajaran maupun membimbing siswa di luar pembelajaran. Keterlibatan guru PKn dalam organisasi kesiswaan juga menjadi faktor dalam membangun sikap demokratis siswa. Perbedaan sikap siswa tidak lepas dari karakter masing-masing siswa yang berbeda mulai dari keaktifan siswa di kelas, diluar kelas dalam organisasi maupun dalam hasil belajarnya.

Membangun partisipasi siswa dalam pembelajaran dikelas dilihat pada sikap interaktif guru PKn yang memacu siswa. Penggunaan metode pembelajaran oleh guru yang menarik seperti diskusi kelompok, mendorong siswa, sehingga mampu berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya, dengan begitu siswa belajar bagaimana cara berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat baik di kelas maupun di luar kelas. Hal ini sebagai pembelajaran siswa dalam berorganisasi setiap kegiatan di sekolah. Adanya dukungan dari pihak sekolah melalui kegiatan yang positif seperti diskusi kelompok, forum-forum, sehingga mampu membantu siswa dalam berfikir dan bersikap secara demokratis. Selain itu, hubungan yang baik antara guru dan siswa terjalin baik pula, ini terlihat melalui kebiasaan siswa dalam berinteraksi dengan guru maupun pihak sekolah. Kerjasama antara pihak sekolah, orang tua dilakukan untuk mengontrol tingkah laku siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Adanya himbuan dari pihak sekolah untuk mengikuti program kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler maupun organisasi seperti IPM, Pramuka, dll, diupaya-

kan pihak sekolah untuk mendorong siswa dalam membangun partisipasinya

Hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor lingkungan yang kurang baik membawa dampak negatif bagi siswa. Adanya rasa malas yang berkembang dalam diri siswa sehingga berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan siswa baik dalam sikap maupun partisipasinya. Usia siswa saat ini belum bisa dikontrol secara baik dalam bersikap dan bertindak. Sehingga tidak memperdulikan dampak yang akan dialami.

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi dengan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, serta mengontrol tingkah laku siswa dengan kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Sehingga diharapkan dari berbagai masalah tersebut mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaikinya.

Berdasarkan berbagai temuan yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, maka saran dan masukan yang peneliti dapat sampaikan untuk berbagai pihak sebagai berikut.

Guru PKn sebagai pengelola kelas yang berhubungan langsung dengan siswa diharapkan supaya lebih mengembangkan proses pembelajaran dikelas antara lain dengan melakukan inovasi-inovasi saat proses belajar mengajar, meningkatkan model pembelajaran interaktif agar siswa tertarik dalam pembelajaran. Sehingga siswa menjadi lebih aktif dan berpikir kritis serta mempunyai keinginan lebih maju, agar dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya harus menyadari pentingnya bersikap demokratis dan berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, ini akan menjadi pelajaran sendiri untuk siswa agar nantinya mereka tidak menjadi korban pembodohan politik, karena nasib negara Indonesia berada di tangan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Sikap siswa harusnya dipupuk dari sekarang agar mempunyai pemikiran lebih maju dan berwawasan luas. Dengan demikian, siswa mempunyai wawasan luas siswa akan mampu berpikir kritis dan aktif serta mempunyai keinginan lebih maju untuk membangun negaranya kelak di kemudian hari.

Kepala sekolah secara terprogram diharapkan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi ke-siswaan untuk generasi muda terutama siswa, sehingga benar-benar lembaga sekolah melaksanakan visi dan misinya. Kegiatan di luar kelas, hendaknya pihak sekolah diharapkan lebih meningkatkan lagi kegiatan yang berhubungan dengan membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi ke-siswaan.

Orang tua dan masyarakat sekitar juga sebaiknya ikut serta dalam membangun sikap demokratis siswa dalam organisasi ke-siswaan agar manfaat yang didapatkan oleh siswa akan terealisasikan pada waktu yang akan datang. Termasuk peduli dan mendukung semua kegiatan sekolah dalam program sosial demi kepentingan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Espinola, Viola. (2005). *Education for Citizenship and Democracy in a Globalized World: A Comparative Perspective*. New York: Regional Policy Dialogue Secretariat, Inter-American Development Bank.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz media.
- Kartono & Kartini. (1996). *Pendidikan politik*. Bandung: Mandar maju.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: an international comparison*. England: National Foundation for Education Research-NFER.
- Maftuh, B. & Sapriya. (2005). Implementasi KBK PKn dalam berbagai konteks. *Jurnal Civicus*. Jurusan PMPKn FPIPS UPI, Bandung.
- Miles, M. B., dan A.M. Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moldovan, Nicoleta-Claudia, Oana-Ramona Lobont, & Milena-Jana Schank. (2014). The Civic Education impact among youth in a democracy. *SEA- Practical Application of Science. Volume II, 3*.

- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003
- Surbakti, R (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Walgito, B (2002). *Psikologisosial (suatu pengantar)*. Yogyakarta: ANDI.
- Wirawan, D. (2000). Kultur nasional dan kepemimpinan: belajar dari Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 4f, 3.
- Leung, Y. W., & Yuen, T. W. W. (2009). Participatory Citizenship and Student Empowerment: Case Study of a Hong Kong School. *International Journal of Citizenship Teaching and Learning*. 5, 1.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi: Prakondisi menuju era globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.